

Strategi Pertahanan Indonesia: Pelajaran Dari Kekalahan Iraq Dalam Perang Teluk II 1990-1991

Yusup Imannurdin¹ Aries Sudiarso² Dohar Sianturi³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya Nomor 14, Kenari Kec. Senen
Jakarta Pusat 10440^{1,2,3}

Email: yusupiman95@gmail.com¹

Abstract

This study aims to analyze Iraq's defeat in the Second Gulf War in 1990-1991 and identify the defense strategy used by that country. In a global context that continues to develop, it is important for Indonesia as an archipelagic country with a strategic position in Southeast Asia to strengthen its defense capabilities and learn valuable lessons from the experiences of other countries. Through a qualitative descriptive literature study approach, this study analyzes the causes of Iraq's defeat in the Second Gulf War and the impact of the strategies they implemented. The Middle East as a conflict area rich in natural resources, especially oil, offers valuable lessons for Indonesia in understanding political dynamics and diversity which are potential threats in maintaining national security. The results of the study show that the international coalition that provided support and pressure on Iraq, as well as violations of international law committed by Iraqi troops when they attacked Kuwait, were the key factors that led to Iraq's defeat. This research also highlights the importance of support from the international community in maintaining regional stability and security. In conclusion, it is important for Indonesia to learn from Iraq's experience in the Second Gulf War to strengthen its national defense strategy. By observing the weaknesses that led to Iraq's failure, Indonesia can anticipate potential threats and develop defense strategies that are more effective, adaptive and based on international support.

Keywords: Defense Strategy, Defeat of Iraq, Literature Study, National Security



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Wilayah Timur Tengah menarik untuk diteliti karena terus mengalami perkembangan politik yang menarik. Salah satu negara di wilayah ini adalah Iraq, yang terletak di antara koordinat 33° hingga 38° Lintang Utara dan 39° hingga 49° Bujur Timur, berbatasan dengan enam negara tetangga. Iraq memiliki luas wilayah sekitar 438.317 km² dan jumlah penduduk sekitar 40 juta jiwa. Sumber daya alam, terutama minyak, menjadi kekayaan utama wilayah ini yang berperan penting dalam kehidupan manusia (Abdullah, 2006). Namun, kekayaan minyak ini juga membuat Iraq dikenal sebagai wilayah konflik dengan banyak keragaman dalam aspek ekonomi, geografis, ideologis, rasial, dan etnis. Salah satu konflik penting yang melibatkan Iraq adalah Perang Teluk II pada tahun 1990-1991 (Abdullah, 2006). Konflik ini bermula dari invasi Iraq terhadap Kuwait, dengan alasan sumber daya alam dan permasalahan perbatasan, yang meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga dan Barat. Akibatnya, koalisi internasional di bawah AS menginvasi Iraq untuk mengusir pasukan Iraq dari Kuwait.

Perang Teluk II bukanlah satu-satunya konflik yang melibatkan Iraq. Sebelumnya, ada Perang Teluk I yang melibatkan konflik antara Iraq dan Iran. Saddam Hussein, yang berkuasa pada saat itu, memiliki ambisi menjadi pemimpin negara Arab atau Timur Tengah dan berencana menyatukan Kuwait dengan wilayahnya. Perang Teluk II dipicu oleh sengketa perbatasan antara kedua negara (Abdullah, 2003). Saddam Hussein mencoba melegitimasi invasinya dengan merujuk pada sejarah Mesopotamia, mengklaim bahwa Kuwait sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Irak. Namun, upaya perdamaian melalui perundingan antara

Kuwait dan Irak gagal, dan pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak menyerbu dan dengan cepat menguasai Kuwait dalam waktu singkat. Emir Kuwait melarikan diri ke Saudi Arabia, dan invasi Irak atas Kuwait dikutuk oleh Raja Fahd ibn Abdul Aziz.

Riza Sihbudi dalam karyanya yang berjudul "Bara Timur Tengah" menyampaikan pandangan yang berbeda tentang penyebab terjadinya Perang Teluk II. Menurutnya, perang tersebut tidak hanya dipicu oleh sengketa wilayah semata. Pemerintah Baghdad sebelumnya mengalami kerugian besar akibat perang Iran-Irak sekitar US\$ 450 miliar dan terjebak dalam utang sebesar US\$ 80 miliar, terutama kepada negara-negara anggota GCC (Gulf Cooperation Council), terutama Saudi Arabia dan Kuwait. Padahal, pendapatan Baghdad pada saat itu diperkirakan hanya sekitar US\$ 12 miliar per tahun. Hal ini berarti bagi Saddam Hussein, membangun kembali negaranya akan memakan waktu setidaknya 40 tahun. Karena situasi tersebut, menyerbu dan menguasai Kuwait menjadi pilihan cepat bagi Saddam untuk mengatasi masalah ekonomi negaranya. Namun, tindakan ini menyebabkan kecaman dari seluruh dunia dan Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 661, memberlakukan sanksi terhadap Irak. Ekspor minyak Irak terhenti karena aneksasi Kuwait, dan pasukan udara AS tiba di Saudi Arabia untuk mendukung pasukan multinasional dalam menghadapi Irak.

Gempuran berulang kali terjadi di Irak sebagai respons atas aksi militer pasukan AS dan sekutunya. Pada tanggal 25 Januari 1991, Irak dituduh menembak dua kapal tanker minyak oleh pasukan multinasional, yang menyebabkan kebocoran minyak di perairan Teluk. Meskipun dengan bukti yang kuat menunjukkan keterlibatan pasukan koalisi multinasional dalam insiden tersebut, dampaknya tidak hanya membuat Saddam marah, tetapi juga menysar rakyat Irak yang menjadi korban dari penyerbuan tersebut. Namun, hal ini justru membuat mayoritas rakyat Irak tetap percaya pada kepemimpinan tangguh Saddam Hussein sebagai presiden, yang dianggap mampu menghadapi serangan dari negara-negara adikuasa seperti AS dan Eropa. Penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di Asia Tenggara, untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanannya menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam menjaga kedaulatannya dan keamanan nasional. Dengan memperkuat strategi pertahanan negara, Indonesia dapat menggali pengalaman dari negara lain yang telah menghadapi situasi serupa dalam perkembangan global di bidang politik, ekonomi, dan militer.

Salah satu peristiwa penting yang dapat menjadi acuan adalah kekalahan Iraq dalam Perang Teluk II pada tahun 1990-1991. Perang Teluk II merupakan konflik militer yang signifikan dan mempengaruhi situasi global pada masa itu. Pengalaman Iraq dalam perang ini menawarkan banyak pelajaran berharga mengenai pentingnya strategi pertahanan yang efektif. Sebagai negara yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas di kawasan, Indonesia perlu memperhatikan dan mempelajari pengalaman Iraq sebagai sumber pembelajaran, sehingga dapat mengantisipasi potensi ancaman dan memperkuat ketahanan nasionalnya. Dalam jurnal ini, peneliti akan melakukan analisis mendalam mengenai kekalahan Iraq dalam Perang Teluk II. Kami akan mengkaji strategi pertahanan yang diterapkan oleh Iraq dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kegagalan mereka dalam perang tersebut. Selain itu, kami akan mengevaluasi relevansi temuan tersebut bagi Indonesia dan bagaimana pengalaman Iraq dapat diaplikasikan sebagai panduan dalam mengembangkan strategi pertahanan yang lebih tangguh dan adaptif, mengingat dinamika global dan regional yang terus berubah. Tujuan utama dari jurnal ini adalah memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara negara-negara dapat memahami dan menanggapi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional dengan tepat. Melalui telaah kasus Iraq dalam Perang Teluk II, diharapkan jurnal ini akan memberikan perspektif berharga bagi pembaca dalam memahami kompleksitas situasi geopolitik dan pentingnya strategi pertahanan yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan menyelidiki berbagai buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Rijali, 2019). Penelitian ini berfokus pada peristiwa kekalahan Iraq dalam Perang Teluk II yang berlangsung dari tahun 1990 hingga 1991, khususnya dalam hubungannya dengan Kuwait. Metode penelitian ini bersifat naratif, di mana penulis berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana Iraq mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Data-data yang relevan dikumpulkan melalui tinjauan literatur untuk menggali informasi yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah mereduksi data, yaitu mencari dan memilah informasi yang sesuai dengan inti dari penelitian ini (Sugiyono, 2010). Data yang terkumpul didukung oleh teori-teori yang relevan dan menjadi dasar dari permasalahan yang diteliti. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan teratur, dengan tujuan untuk menyampaikan temuan penelitian secara komprehensif. Kesimpulan penelitian ini diambil berdasarkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan. Pemilihan metode studi kepustakaan dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengakses dan menganalisis berbagai informasi dan sudut pandang yang terkait dengan kekalahan Iraq dalam Perang Teluk II. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang strategi pertahanan yang diadopsi oleh Iraq, dan memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan strategi pertahanan nasional yang lebih kuat dan adaptif berdasarkan pengalaman tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik Irak dan Kuwait dalam Perang Teluk 1990-1991

Kuwait merupakan sebuah negara kecil di wilayah Teluk yang menyimpan sumber daya alam yang sangat berharga, yaitu minyak. Wilayah Kuwait kaya akan cadangan minyaknya, yang merupakan komoditas utama di kawasan Timur Tengah (Yahya, 2022). Minyak memiliki peran penting sebagai bahan bakar dan menjadi faktor utama dalam periode industri pada waktu itu. Invasi yang dilancarkan oleh Irak ke Kuwait tidak terjadi begitu saja, melainkan ada beberapa faktor yang mendasarinya. Terdapat empat faktor yang menjadi pendorong bagi Irak untuk menyerang dan menguasai Kuwait. Faktor-faktor tersebut adalah sejarah, ekonomi, ambisi Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak, dan keinginan Irak untuk menguasai ladang minyak (Tirtaruslin, 2021).

Perang Teluk II pada tahun 1990-1991 antara Irak dan Kuwait, yang kemudian melibatkan Koalisi Pasukan Internasional, merupakan salah satu konflik yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan keamanan global. Di tengah situasi geopolitik yang kompleks tersebut, Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengambil posisi dan merumuskan strategi pertahanan untuk menghadapi perkembangan situasi regional dan global [10]. Berikut adalah bahasan mengenai strategi pertahanan Indonesia dalam konteks konflik Irak dan Kuwait dalam Perang Teluk 1990-1991:

1. Kebijakan Netralitas. Indonesia telah lama menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam hubungan internasional. Ketika konflik antara Irak dan Kuwait meletus, pemerintah Indonesia secara konsisten mengambil posisi netral dan tidak ikut campur dalam konflik tersebut. Kebijakan netralitas ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan menghindari terjebak dalam konfrontasi militer yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
2. Diplomasi dan Peran Mediasi. Sebagai negara dengan tradisi diplomasi yang kuat, Indonesia berusaha memainkan peran mediasi dalam mencari solusi damai untuk konflik antara Irak dan Kuwait. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya PBB dalam

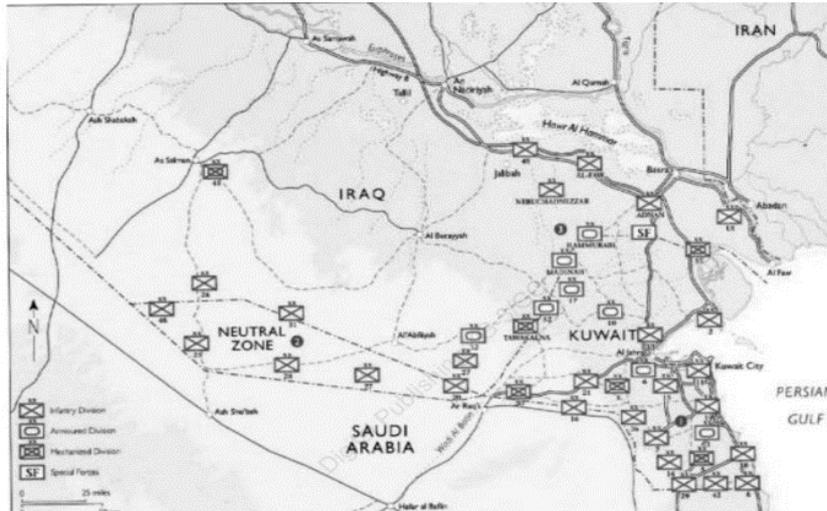
menyelesaikan sengketa internasional secara diplomatik dan berbasis hukum internasional. Melalui diplomasi aktif, Indonesia berusaha mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk duduk bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

3. Fokus pada Diplomasi Ekonomi. Perang Teluk II berdampak pada stabilitas ekonomi global dan harga minyak dunia. Sebagai negara dengan ekonomi yang tergantung pada impor minyak, Indonesia harus memastikan stabilitas pasokan energi dan harga minyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomasi ekonomi untuk menjaga hubungan ekonomi dengan negara-negara produsen minyak utama dan merespons fluktuasi harga minyak yang terjadi akibat konflik tersebut.
4. Peningkatan Kemampuan Pertahanan. Meskipun tidak ikut campur dalam konflik, Indonesia menyadari pentingnya menjaga kemampuan pertahanan nasional sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi regional yang tidak dapat diprediksi. Peningkatan kemampuan pertahanan ini dilakukan sebagai bentuk langkah preventif untuk menghadapi potensi gangguan keamanan di kawasan dan memastikan integritas teritorial Indonesia.
5. Berperan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Sebagai anggota PBB yang aktif, Indonesia berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks konflik Irak dan Kuwait, Indonesia dapat mengirimkan personel militer atau polisi sebagai bagian dari pasukan pemeliharaan perdamaian PBB untuk membantu mengatasi dampak kemanusiaan dan membantu proses rekonsiliasi di kawasan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa strategi pertahanan Indonesia dalam konflik Irak dan Kuwait dalam Perang Teluk 1990-1991 didasarkan pada prinsip-prinsip diplomasi, netralitas, dan kepentingan nasional (Tirtaruslin, 2021). Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, tetapi tetap aktif dalam upaya mencari solusi damai dan menjaga stabilitas di kawasan regional dan global.

Strategi Iraq dalam Perang Teluk

Pada tahun 1988, setelah berakhirnya perang Iran-Irak, Angkatan Darat Irak menjadi salah satu dari empat tentara terbesar di dunia, terdiri dari 955.000 tentara dan 650.000 pasukan paramiliter dalam Tentara Populer. Analisis menunjukkan bahwa Angkatan Darat Irak memiliki kemampuan untuk mengerahkan satu juta personel dan 850.000 pasukan cadangan, serta dilengkapi dengan 5.500 tank, 3.000 artileri, 700 pesawat tempur dan helikopter. Selain itu, mereka memiliki 53 divisi, 20 brigade pasukan khusus, beberapa milisi regional, dan sistem pertahanan udara yang tangguh. Sebelum melancarkan invasi ke Kuwait, pasukan komando Irak melakukan penyusupan ke perbatasan Kuwait untuk mempersiapkan serangan dari unit utama pada tengah malam. Serangan Irak dilakukan dalam dua cabang, dengan pasukan utama menyerang ke arah selatan melalui jalan raya utama menuju Kota Kuwait, sementara pasukan pendukung melakukan gerakan lebih jauh ke barat dan berbelok ke arah timur untuk memotong akses ke Kota Kuwait dari bagian selatan negara tersebut (Abdullah, 2006).



Gambar 1. Peta Dislokasi pasukan Iraq setelah Invasi Militer terhadap Kuwait

Komandan dari Brigade Lapis Baja ke-35 Kuwait dengan tegas memobilisasi pasukannya untuk melawan serangan Irak dan berhasil menjaga pertahanan yang kokoh di Pertempuran Jembatan di dekat Al Jahra, sebelah barat Kota Kuwait (Abdullah, 2003). Irak melakukan dorongan utama ke Kota Kuwait dengan pasukan komando yang diangkut menggunakan helikopter dan kapal untuk menyerang kota dari laut, sementara divisi lain merebut bandara dan dua pangkalan udara. Pasukan Irak menyerbu Istana Dasman, Kediaman Kerajaan Emir Kuwait, yang dipertahankan dengan gigih oleh Garda Emiri yang didukung oleh tank M-84. Dalam serangan itu, adik bungsu Emir, Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, tewas oleh pasukan Irak.

Dalam kurun waktu 12 jam, sebagian besar perlawanan di Kuwait berakhir dan keluarga kerajaan melarikan diri, meninggalkan sebagian besar wilayah Kuwait. Setelah dua hari pertempuran sengit, sebagian besar militer Kuwait berada di bawah kendali Pengawal Republik Irak, sementara sebagian lainnya melarikan diri ke Arab Saudi. Emir dan menteri-menteri kunci pemerintahan berhasil melarikan diri ke selatan dan mencari perlindungan di Arab Saudi. Pasukan darat Irak menguasai kendali atas Kota Kuwait, kemudian bergerak ke selatan dan menempati posisi di sepanjang perbatasan dengan Saudi. Setelah mencapai kemenangan yang menentukan, Saddam awalnya mendirikan rezim boneka yang disebut "Pemerintahan Sementara Kuwait Bebas," dan kemudian menunjuk sepupunya, Ali Hassan al-Majid, sebagai gubernur Kuwait pada tanggal 8 Agustus.

George Baker, Wakil Presiden AS, melakukan perjalanan selama 11 hari ke sembilan negara untuk memastikan dukungan ekonomi dalam perang melawan Irak. Arab Saudi setuju untuk menyediakan 15 miliar dolar sebagai biaya perang, sementara Emir Kuwait juga setuju untuk memberikan jumlah yang sama. Presiden Mubarak dari Mesir sepakat untuk mengerahkan pasukan ke dalam koalisi, dan sebagai imbalan, Amerika Serikat bersedia mengampuni utang Mesir sebesar 7,1 miliar dolar (Finlan, 2003).

Presiden Suriah, Hafez Assad, setuju untuk menyediakan hingga 100.000 tentara Suriah untuk ikut serta dalam upaya koalisi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan partisipasi negara-negara Arab dalam koalisi. Italia juga setuju untuk menyediakan beberapa peralatan militer, sementara Jerman berkomitmen memberikan kontribusi sebesar dua miliar dolar untuk dukungan perang koalisi. Selain itu, Turki juga menyediakan dukungan ekonomi dan militer lebih lanjut, termasuk pengangkutan tentara dan kapal dari Mesir ke Teluk Persia. Uni Soviet juga mendukung intervensi Amerika Serikat dalam konflik ini. Meskipun Jepang dan Jerman tidak menyumbangkan kekuatan militer, mereka berkontribusi secara finansial dengan

masing-masing menyediakan 10 miliar dolar dan 6,6 miliar dolar. Pasukan AS menyumbang 73% dari total 956.600 tentara dalam koalisi yang beroperasi di Irak.

Perang Teluk II pada tahun 1990-1991 merupakan konflik militer yang melibatkan Irak sebagai negara agresor dan Kuwait sebagai negara yang diserang. Dalam perang tersebut, Irak menerapkan sejumlah strategi pertahanan untuk mencapai tujuannya dalam menguasai Kuwait. Di tengah situasi tersebut, Indonesia sebagai negara dengan kebijakan netralitas dan tidak terlibat dalam konflik tersebut, perlu melakukan analisis dan pembelajaran dari strategi yang diterapkan oleh Irak. Berikut adalah bahasan mengenai strategi pertahanan Indonesia dalam konteks strategi Iraq dalam Perang Teluk 1990-1991:

1. Penghormatan terhadap Kedaulatan Negara Lain. Sebagai negara dengan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada Pancasila, Indonesia selalu menghormati kedaulatan negara-negara lain. Dalam konteks perang antara Irak dan Kuwait, Indonesia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara di kawasan dan dunia. Indonesia mengecam invasi Irak terhadap Kuwait dan menyatakan dukungan terhadap resolusi PBB yang menuntut penarikan pasukan Irak dari Kuwait.
2. Diplomasi sebagai Solusi Konflik. Indonesia secara konsisten memperjuangkan penyelesaian konflik internasional melalui jalur diplomatik dan dialog. Dalam konteks Perang Teluk II, Indonesia mendukung upaya-upaya PBB dan negara-negara anggota untuk mencari solusi damai dan menyelesaikan konflik secara diplomatik. Diplomasi menjadi sarana utama untuk mencapai perdamaian dan menghindari konfrontasi militer yang berdampak negatif bagi stabilitas kawasan.
3. Tidak Menggunakan Kekuatan Militer untuk Ekspansi. Sebagai negara yang menghargai prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia tidak menggunakan kekuatan militer untuk tujuan ekspansi atau invasi terhadap negara-negara lain. Indonesia menjunjung tinggi penyelesaian konflik melalui dialog dan tidak mendukung aksi militer yang bertentangan dengan hukum internasional dan norma-norma internasional.
4. Fokus pada Pengembangan Kemampuan Pertahanan. Sambil memprioritaskan diplomasi sebagai cara penyelesaian konflik, Indonesia juga memahami pentingnya memiliki kemampuan pertahanan yang memadai. Oleh karena itu, Indonesia secara terus-menerus mengembangkan kemampuan pertahanan nasional untuk menjaga integritas teritorial dan kedaulatan negara dari potensi ancaman militer, tanpa diarahkan untuk agresi terhadap negara-negara lain.
5. Berperan dalam Pemeliharaan Perdamaian PBB. Indonesia aktif berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bentuk kontribusi positif dalam menangani konflik dan ketegangan di berbagai wilayah. Melalui partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian, Indonesia berperan dalam membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi perdamaian dan keamanan global.

Melalui strategi pertahanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip diplomasi, netralitas, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara lain, Indonesia dapat memperkuat peran dan posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam konflik Perang Teluk II, pembelajaran dari strategi yang diterapkan oleh Irak menjadi penting untuk menghadapi potensi ancaman dan ketegangan regional serta global di masa depan. Dengan mengedepankan diplomasi dan dialog, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang aman, damai, dan stabil bagi seluruh negara-negara di dunia.

Koalisi Pasukan Internasional

Sebuah koalisi kekuatan dari 34 negara, termasuk Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Belgia, Kanada, Denmark, Mesir, Prancis, Yunani, Italia, Kuwait, Maroko, Belanda, Selandia Baru, Niger, Norwegia, Oman, Pakistan, Polandia, Portugal, Qatar, Korea Selatan, Arab Saudi, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Spanyol, Suriah, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat, terbentuk untuk menghadapi agresi Irak. Mereka menerapkan serangan udara dan tembakan angkatan laut untuk membuat Irak mengira bahwa serangan darat utama koalisi akan terfokus di tengah wilayah Kuwait.

Dalam pertempuran ini, pasukan Kuwait ditugaskan untuk membebaskan kota, sementara pasukan Irak hanya menawarkan perlawanan ringan. Kuwait berhasil membebaskan kota dengan kehilangan satu tentara dan satu pesawat yang ditembak jatuh. Pada tanggal 17 Januari 1991, Resimen Penerbangan Divisi Lintas Udara 101 melakukan tembakan pertama perang dengan berhasil menghancurkan dua situs radar peringatan dini Irak menggunakan delapan helikopter AH-64. Kemudian, pada 22 Februari 1991, Irak setuju dengan perjanjian gencatan senjata yang diusulkan oleh Uni Soviet. Perjanjian ini mengharuskan Irak menarik pasukannya ke posisi pra-invasi dalam waktu enam minggu setelah gencatan senjata. Di tengah persiapan ini, Korps VII AS melancarkan serangan lapis baja ke Irak pada 24 Februari di sebelah barat Kuwait, yang mengakibatkan pasukan Irak kewalahan. Pada tanggal 25 Februari 1991, rudal Scud menyerang barak Angkatan Darat AS dari Detasemen Quartermaster ke-14 yang ditempatkan di Dhahran, Arab Saudi.

Peristiwa tambahan terjadi pada tanggal 29 Januari, ketika pasukan Irak menyerang dan menduduki kota Khafji di Arab Saudi, yang hanya sedikit dipertahankan dengan tank dan infanteri. Pertempuran Khafji berakhir dua hari kemudian ketika pasukan Irak diusir kembali oleh Garda Nasional Arab Saudi, dengan dukungan dari pasukan Qatar dan Marinir AS. Meskipun kedua belah pihak mengalami korban, pasukan Irak menderita lebih banyak korban tewas dan ditangkap daripada pasukan koalisi. Selama enam minggu, pasukan sekutu terlibat dalam perang udara yang intensif untuk menghantam infrastruktur militer dan sipil Irak, dan mereka menghadapi sedikit perlawanan efektif dari angkatan udara atau pertahanan udara Irak. Pasukan darat Irak menjadi sangat lemah selama tahap perang ini, dan satu-satunya tindakan pembalasan yang signifikan dari Hussein adalah meluncurkan serangan rudal SCUD terhadap Israel dan Arab Saudi. Saddam berharap serangan rudal ini akan memprovokasi Israel untuk ikut terlibat dalam konflik, dengan tujuan untuk mengurangi dukungan Arab terhadap perang. Namun, atas permintaan Amerika Serikat, Israel tetap tidak ikut terlibat dalam perang tersebut.

Pasukan koalisi berhasil menguasai keadaan di udara berkat keunggulan teknologi mereka. Supremasi udara ini berhasil dicapai sebelum dimulainya serangan darat utama. Selain itu, pasukan koalisi juga memiliki dua keunggulan teknologi yang sangat signifikan. Pertama, tank tempur utama milik koalisi seperti M1 Abrams dari Amerika Serikat, British Challenger 1, dan M-84AB dari Kuwait jauh lebih superior daripada tank T-72 Tipe 69 dan model ekspor yang digunakan oleh Irak. Selanjutnya, penggunaan teknologi GPS memungkinkan pasukan koalisi untuk melakukan navigasi tanpa mengandalkan jalan atau landmark tetap lainnya. Ini, bersama dengan kemampuan pengintaian udara, memungkinkan mereka untuk melakukan pertempuran dengan taktik manuver daripada taktik pertempuran pertemuan. Dengan memiliki informasi yang jelas tentang posisi mereka dan musuh, pasukan koalisi dapat menyerang target tertentu dengan lebih efisien daripada hanya mencari pasukan musuh di darat secara umum.

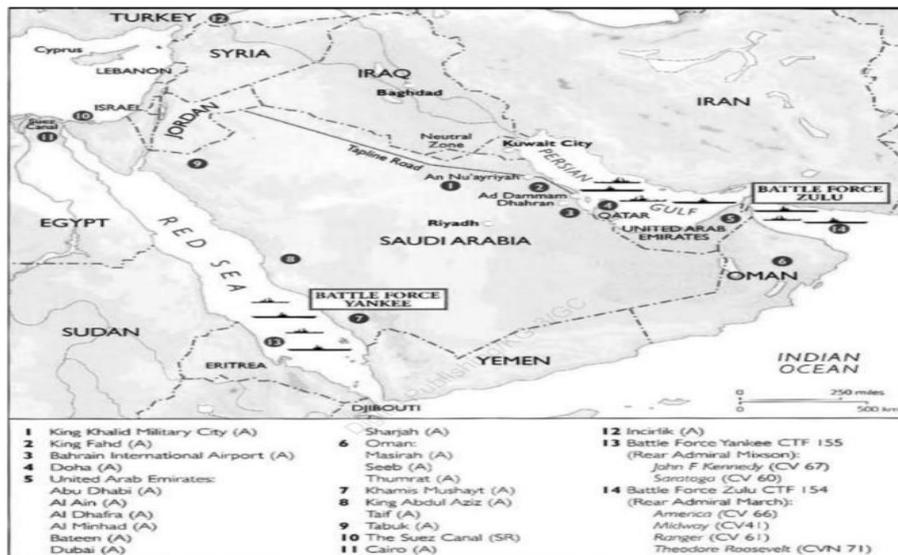
Dalam konteks strategi pertahanan Indonesia, dapat diambil beberapa pembelajaran dari Perang Teluk II. Penerapan teknologi dan peralatan militer yang canggih memberikan

keunggulan taktis yang signifikan bagi pasukan koalisi. Selain itu, kerja sama dalam bentuk koalisi internasional juga terbukti berhasil dalam menghadapi ancaman bersama. Dalam mengembangkan strategi pertahanan nasional yang tangguh dan adaptif, Indonesia dapat memperkuat kemampuan militer dengan fokus pada modernisasi dan penggunaan teknologi canggih. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara lain, khususnya di wilayah Asia Tenggara, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Kesadaran akan pentingnya peralatan modern dan pelatihan personel yang memadai serta kerja sama dengan negara-negara mitra regional dan global dalam menghadapi ancaman yang kompleks akan menjadi faktor penting dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Lebih dari itu, diplomasi dan kemitraan regional juga harus ditingkatkan untuk mencapai stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan.

Operasi Badai Gurun

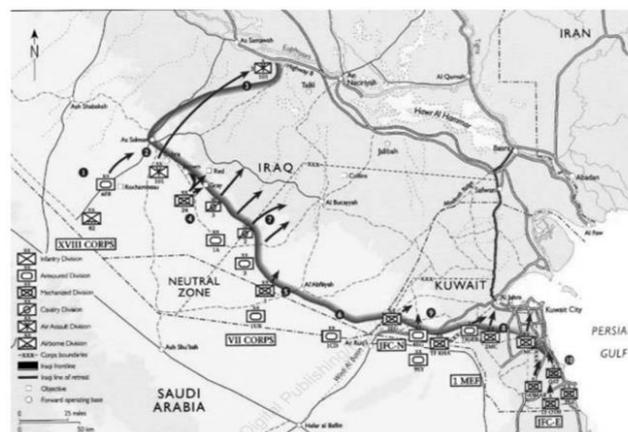
Pasukan Koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat melaksanakan "Operasi Badai Gurun" sebagai tindakan pelaksanaan Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB. Tujuan dari operasi militer ini adalah mengusir Irak dari Kuwait, memulihkan keamanan dan perdamaian di wilayah Timur Tengah, serta mengembalikan kedaulatan Kuwait. Operasi ini dipimpin oleh Jenderal H. Norman Schwarzkopf dan terdiri dari dua tahap, yaitu serangan udara dan operasi darat gabungan. Tahap serangan udara dimulai setelah batas waktu yang ditetapkan oleh Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB berakhir, ketika Irak tidak menarik mundur pasukannya dari Kuwait. Serangan udara ini melibatkan pesawat tempur dari berbagai negara anggota Pasukan Koalisi, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Helikopter Apache memulai serangan udara dengan menghancurkan Radar Peringatan Dini di wilayah barat Irak yang dapat mengancam gerakan Pasukan Koalisi.

Selanjutnya, Pasukan Koalisi menggunakan pesawat tempur Stealth, Bomber Jarak Jauh, dan pesawat tempur Bombensional. Pada tanggal 16 Januari 1991, sepuluh pesawat tempur Stealth dikerahkan untuk menghancurkan Komando Pertahanan Udara Irak di selatan Irak, serta pusat telekomunikasi di Bagdad. Tujuh pesawat pembom B52G diluncurkan dari pangkalan di Louisiana, Amerika Serikat, dan 15 jam kemudian, mereka melepaskan 35 bom AGM-86C ALCMs yang sangat akurat. Pesawat tempur dari Amerika Serikat juga menggunakan pangkalan Diego Garcia untuk menjatuhkan bom berdaya ledak besar yang bertujuan menurunkan moril dan semangat tempur pasukan Irak. Serangan udara terus berlangsung dengan sasaran yang bervariasi, termasuk Pusat Telekomunikasi, Pusat Kendali dan Komando Pasukan Irak, infrastruktur pertahanan Irak, pesawat tempur, dan sistem pertahanan udara. Selama Perang Teluk I, Pasukan Koalisi melancarkan sekitar 110.000 serangan udara dan menjatuhkan sekitar 90.000 ton bom. Di samping operasi darat, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mendukung pasukan Marinir-nya dalam "Operasi Tirai Gurun" (Operation Desert Shield) untuk melindungi Arab Saudi dari intervensi militer Irak. Dalam operasi ini, Pasukan Koalisi diperkuat oleh kekuatan laut dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Portugis, Arab Saudi, Turki, dan Spanyol.



Gambar 2. Peta Dislokasi Pangkalan dan Armada Angkatan Laut Pasukan Koalisi PBB

Pasukan Koalisi melanjutkan serangannya dengan meluncurkan "operasi darat gabungan." Pada tanggal 24 Februari 1991, pukul 04.00 waktu setempat, Korps Lintas Udara XVIII bekerjasama dengan Korps VII melancarkan serangan darat untuk menghancurkan Pasukan Garda Republik Irak. Tujuan utama dari operasi ini adalah melakukan penyekatan dan mencegah perkuatan pasukan Irak di wilayah Kuwait. Divisi VI Tank Ringan Prancis dan Divisi Lintas Udara ke-101 juga ikut berpartisipasi dalam serangan ini dengan menduduki posisi strategis untuk membentuk pangkalan dukungan logistik bagi pasukan berikutnya. Pada hari pertama operasi darat, Korps Lintas Udara XVIII berhasil mengalahkan pasukan Irak dan berhasil mencapai wilayah Irak sejauh 273 kilometer. Akibat serangan tersebut, banyak pasukan Irak yang menyerah. Dalam mendukung "Operasi Badai Gurun," Pasukan Koalisi menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya, termasuk peralatan dan persenjataan canggih yang dilengkapi dengan sistem komando, kendali, dan komunikasi mutakhir. Pertempuran antara Pasukan Koalisi dan Pasukan Irak berlangsung cukup berat, namun akhirnya seluruh wilayah Kuwait berhasil direbut kembali, dan pasukan Irak dipukul mundur dari Kuwait. Pada tanggal 27 Februari 1991, seluruh wilayah Kuwait berhasil dibebaskan, dan pada sore harinya, gencatan senjata antara Pasukan Koalisi dan Irak diberlakukan.



Gambar 3. Peta Operasi Darat Gabungan (24 Februari 1991)

Operasi Badai Gurun merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang menarik untuk dipelajari. Dalam operasi ini, pasukan koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat berhasil melumpuhkan Irak dan merebut kembali Kuwait. Dengan melibatkan lebih dari 900.000 tentara dari dua puluh empat negara, sebagian besar ditempatkan di perbatasan Saudi-Irak, operasi ini menghasilkan dampak yang signifikan. Data menyebutkan bahwa terdapat sekitar 3.500 penduduk sipil yang kehilangan nyawa selama Operasi Badai Gurun. Namun, laporan lain menyatakan bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai 200.000 orang. Selain korban manusia, Irak juga mengalami kerugian besar dalam hal peralatan militer, termasuk 2.085 tank, 962 kendaraan lapis baja, 1.005 artileri, dan 103 pesawat terbang yang berhasil direbut oleh pasukan koalisi.

Melalui peristiwa ini, terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Salah satu pembelajaran utama adalah pentingnya menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah. Hal ini menjadi relevan bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan yang luas dan perlu memastikan keamanan teritori dari ancaman eksternal. Strategi pertahanan Indonesia harus memprioritaskan kekuatan militer dan keamanan nasional untuk mencegah potensi ancaman terhadap wilayah negara. Penting juga bagi Indonesia untuk memahami peran diplomasi dan kerjasama dalam organisasi internasional, khususnya PBB, untuk menyelesaikan konflik. Operasi Badai Gurun menegaskan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik lebih diutamakan daripada tindakan militer. Oleh karena itu, Indonesia harus aktif berperan dalam organisasi internasional dan menggunakan diplomasi sebagai alat utama untuk menyelesaikan sengketa dan ketegangan antarnegara.

Meskipun tidak terlibat langsung dalam operasi militer seperti Operasi Badai Gurun, Indonesia harus tetap meningkatkan kemampuan pertahanan nasional yang memadai. Di tengah situasi global yang dinamis, potensi ancaman terhadap negara tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, investasi dalam pembangunan kemampuan pertahanan, termasuk dalam bidang militer dan sumber daya manusia, harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Indonesia juga dapat mengambil pembelajaran dari peran negara-negara dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB selama Operasi Badai Gurun. Partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik dan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi perdamaian dan keamanan global.

Dalam era modern yang didominasi oleh teknologi, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional dengan mengembangkan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) berbasis teknologi terkini. Dengan mengadopsi teknologi modern, Indonesia dapat mencapai keunggulan militer yang lebih baik dan mampu menghadapi potensi ancaman dari berbagai dimensi. Kesimpulannya, Operasi Badai Gurun memberikan banyak pembelajaran bagi Indonesia tentang strategi pertahanan nasional. Dengan mengedepankan diplomasi, menjaga kedaulatan wilayah, dan mengembangkan kemampuan pertahanan yang memadai, Indonesia dapat tetap menjadi negara yang kuat dan stabil di tengah dinamika geopolitik global. Strategi pertahanan yang kokoh dan adaptif akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional serta berperan sebagai aktor yang berkontribusi positif dalam perdamaian dan keamanan internasional.

PENUTUP

Kekalahan Irak dalam Perang Teluk II pada tahun 1990-1991 disebabkan oleh serangkaian faktor kompleks yang mempengaruhi jalannya konflik tersebut. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kekalahan Irak meliputi ketidaksiapan pasukan, masalah logistik dan pasokan, serta serangan intensif dari koalisi internasional dengan teknologi dan

senjata yang lebih modern. Pasukan Irak juga menghadapi serangan udara yang intensif terhadap sasaran strategis, yang menyebabkan kerusakan parah dan kehilangan pasukan serta peralatan militer. Kemampuan koalisi internasional dalam melakukan serangan yang efektif menghambat daya tahan dan kemampuan tempur pasukan Irak, sehingga mempengaruhi hasil perang secara keseluruhan. Selain faktor militer, faktor politik dan diplomasi juga berperan dalam kekalahan Irak. Aliansi yang awalnya bersimpati dengan Irak berubah dan beralih mendukung koalisi internasional, yang menyebabkan isolasi politik bagi Irak di tingkat regional. Sanksi ekonomi dan politik yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat juga berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan politik negara tersebut. Secara keseluruhan, kekalahan Irak dalam Perang Teluk II mengandung pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan strategi pertahanan nasional. Melalui analisis mendalam terhadap kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kegagalan Irak, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional dan mengantisipasi potensi ancaman yang mungkin dihadapi. Selain itu, faktor politik dan diplomasi juga penting dalam membentuk persepsi dan dukungan dari negara-negara tetangga dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Dengan memahami pelajaran dari kekalahan Irak, Indonesia dapat mengembangkan strategi pertahanan yang lebih adaptif, tangguh, dan berbasis pada kerjasama internasional untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. A. J. (2003). *A Short History of Iraq, From 636 to the present*. Pearson Education Limited Essex.
- Abdullah, T. A. J. (2006). *Dictatorship, Imperialism and Chaos Iraq since 1989*. Fernwood Publishing, Nova Scotia.
- Arpah, S. (2017). *Perang Teluk Dan Intervensi Amerika Serikat*. Jurnal Pendidikan Islam, 9(2), September.
- Arto, R. S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(3).
- Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K. (2019). Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah) Protection of War Reporters in Armed Conflict Areas Based on International Law (Case Study Of The Iraq And Syria Conflict). *Cepalo*, 3, 11-18.
- Blum, W. (n.d.). Iraq 1990-1991: Desert Holocaust. Retrieved from <http://www.doublestandards.org/blum18.html>.
- Finlan, A. (2003). *Essential Histories - The Gulf War 1991*. Osprey Publishing Ltd., Oxford.
- Husein, M. S. M. (2021). *Kisah dibalik perang Teluk 1990-1991*. Yusuf Solicien.
- Nugraheni, T. R. (2021). *Upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Irak dan Kuwait pada perang teluk 1990-1991*. Jurnal artefak, 8(1), April.
- Persian Gulf War. (n.d.). Encarta.msn.com. Retrieved from http://Encarta.msn.com/encyclopedia_761551555/Persian_Gulf_War.html.
- Prakoso, L. Y., et al. (2021). *Bahan Ajar Sejarah Perang*. Universitas Pertahanan RI.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Titaruslin, I. (2013). *Memetakan Konflik Di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)*. Jurnal Politik Profetik, 1(1).
- Yahya, H. (n.d.). *Di Balik Perang Teluk. Seruan Kebenaran*. Retrieved from <http://www.harunyahya.com/indo/artikel/028.htm>.